

INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN DELI SERDANG 2016



INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN DELI SERDANG 2016



INDIKATOR EKONOMI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016

ISBN: 978-602-6374-72-1

No. Publikasi : 12120.1733

Katalog : 9201001.1212

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 41 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Penyunting

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Gambar Kover oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Diterbitkan oleh

© BPS Kabupaten Deli Serdang

Dicetak oleh

CV Rilis Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indikator Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016** merupakan publikasi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Publikasi ini merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya. Publikasi ini memberikan beberapa gambaran ekonomi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh melalui survei dan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Deli Serdang, terdapat pula data sekunder yang dikelola oleh instansi pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Data-data yang disajikan meliputi data indeks harga konsumen, pendapatan regional, dan data keuangan.

Publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi khususnya dalam bidang perekonomian di Kabupaten Deli Serdang. Saran dari para pengguna data sangat diharapkan untuk dapat menyempurnakan publikasi mendatang. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Pakam, Oktober 2016
**Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang**



Ir. TUTI HIDAYATI, M.Si

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Konsep dan Definisi.....	4
1.4 Sumber Data	9
BAB II. ULASAN SINGKAT	11
2.1 Indeks Harga Konsumen.....	13
2.2 Produk Domestik regional Bruto.....	15
2.3 Keuangan Daerah.....	18
BAB III. LAMPIRAN	21

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indeks Harga Konsumen Kota Medan Januari – Desember 2016 (2007=100)	23
Tabel 2	Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Kota Medan Terhadap Bulan Sebelumnya Januari – Desember 2016 (2007=100) .	25
Tabel 3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)	27
Tabel 4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)	28
Tabel 5	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013-2016 (Persen)	29
Tabel 6	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2013-2016 (Persen)	30
Tabel 7	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Persen)	31
Tabel 8	Indeks Implisit PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Persen)	32
Tabel 9	Angka-angka Agregatif PDRB, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016.....	33

Tabel 10	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	34
Tabel 11	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016....	38
Tabel 12	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	39
Tabel 13	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	40
Tabel 14	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016.....	41

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Periode Januari – Desember 2016	14
Grafik 2	Laju Inflasi Kumulatif Berdasarkan Komponen Kelompok Penyusun Inflasi	15
Grafik 3	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016.....	16
Grafik 4	Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016	17
Grafik 5	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016.....	18
Grafik 6	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.....	19
Grafik 7	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016	20

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

<https://adipserodipangkab.bps.go.id>

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional adalah upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya. Pembangunan di berbagai aspek tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu visi otonomi daerah dibidang ekonomi adalah otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Dalam hal ini, untuk mencapai visi tersebut pemerintah daerah memerlukan data dan informasi sebagai landasan dalam menyusun suatu perencanaan dan kebijakan khususnya dibidang perekonomian. Oleh karena itu, sebagai penyedia data statistik, Badan Pusat Statistik memenuhi peranan dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Dalam mendukung peran tersebut akhirnya Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang menerbitkan suatu publikasi yang berjudul *Indikator Ekonomi Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016*.

1.2. TUJUAN

Tujuan penerbitan publikasi ini untuk menyediakan data bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk menyediakan data bagi masyarakat pengguna data terutama yang berhubungan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Deli Serdang.

1.3. KONSEP DAN DEFINISI

A. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah suatu indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan harga konsumen. IHK diperoleh dengan cara menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas. Paket komoditas yang digunakan adalah yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat serta menggunakan diagram timbangan nilai konsumsi hasil pemantauan pada suatu tahun dasar. IHK merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

a. Inflasi

Merupakan suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.

b. Deflasi

Merupakan suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.

B. Tahun Dasar

Merupakan periode waktu dimulainya penghitungan dimana indeksnya = 100 (2012 = 100) untuk inflasi, sedangkan PDRB indeksnya = 100 (2010=100).

C. Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Harga konsumen harga dari berbagai jenis barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah kota (urban) dengan transaksi secara eceran. Harga yang dipantau untuk penghitungan IHK adalah harga konsumen di pasar perkotaan.

D. Diagram Timbangan

Merupakan nilai yang menunjukkan seberapa banyak suatu barang/jasa dikonsumsi. Nilai penimbang ini diperoleh melalui Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dalam menghitung pendapatan regional, hanya dipakai konsep Domestik. Artinya, seluruh nilai tambah dari berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah/region (dalam hal ini Kabupaten dan Kota di Provinsi) dihitung dan dimasukkan, tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 17 Sektor yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Kategori A)
2. Pertambangan dan Penggalian (Kategori B)
3. Industri Pengolahan (Kategori C)
4. Pengadaan Listrik dan Gas (Kategori D)
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kategori E)
6. Konstruksi (Kategori F)
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G)
8. Transportas dan Pergudangan (Kategori H)
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kategori I)
10. Informasi dan Komunikasi (Kategori J)
11. Jasa Keuangan dan Asuransi (Kategori K)
12. Real Estate (Kategori L)
13. Jasa Perusahaan (Kategori M dan N)
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (Kategori O)
15. Jasa Pendidikan (Kategori P)
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kategori Q)
17. Jasa Lainnya (Kategori R, S, T, dan U)

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan/*enterprenership*); semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok, dan (5) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena didalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Dalam publikasi ini yang dihitung adalah PDRB dalam pengertian produksi yaitu jumlah nilai tambah atas produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang dikelompokkan ke dalam sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha, sehingga PDRB ini dikenal sebagai PDRB Menurut Lapangan Usaha.

Kegunaan PDRB:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah.
3. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
4. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
5. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
6. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

F. Keuangan Daerah

Penerimaan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama untuk membiayai pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berupa pajak daerah, bantuan pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Pusat. Sedangkan realisasi pengeluaran pemerintah daerah terdiri dari belanja aparatur, belanja publik serta belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

1.4. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang berasal dari survei-survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang baik yang dilaksanakan secara mingguan, bulanan maupun secara tahunan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui instansi-instansi terkait.

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB 2

ULASAN SINGKAT

<https://delisa.org/bps.go.id>

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

2.1 Indeks Harga Konsumen/Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) pada periode tertentu. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Angka inflasi merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen yang diperoleh dari Survei Harga Konsumen yang dilakukan setiap bulan.

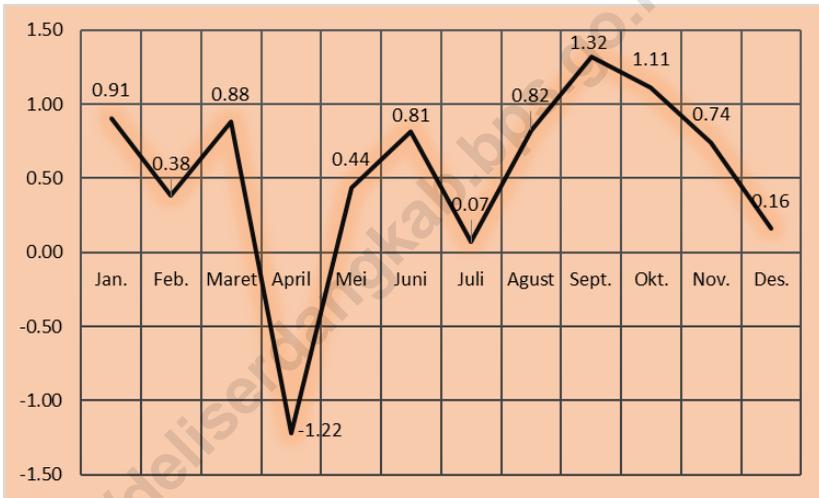
Sejak tahun 2012, penghitungan inflasi di Indonesia dilakukan terhadap 82 Kota. Untuk Provinsi Sumatera Utara, penghitungan inflasi hanya dilakukan pada 4 kota yaitu, Kota Medan, Pematangsiantar, Padangsidempuan, dan Sibolga. Sementara untuk kabupaten/kota yang tidak melakukan penghitungan inflasi, dapat menggunakan angka inflasi dari Kota yang melakukan penghitungan inflasi. Penentuan berdasarkan kemiripan pola konsumsi masyarakat dan kedekatan wilayah geografisnya. Untuk Kabupaten Deli Serdang, angka inflasi yang dijadikan acuan adalah angka inflasi Kota Medan yang dianggap memiliki kemiripan dalam pola konsumsi masyarakatnya serta kedekatan wilayah geografisnya, dimana beberapa kecamatan di Kabupaten Deli Serdang berbatasan langsung dengan Kota Medan.

Gambaran umum inflasi yang terjadi di Kota Medan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dapat dilihat pada grafik 1. Secara umum, tingkat inflasi di Kota Medan cukup berfluktuatif. Terjadi sekali deflasi di Kota Medan yaitu pada bulan April. Sedangkan pada bulan-bulan lain terjadi inflasi.

Inflasi tertinggi selama tahun 2016 terjadi pada bulan September, yakni sebesar 1,32 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 130,29. Hal ini disebabkan naiknya harga kelompok bahan makanan, antara lain kenaikan harga cabai merah, bawang merah, daging ayam, dan kelompok bahan makanan lainnya. Sementara laju inflasi terendah terjadi pada

bulan April yaitu mengalami deflasi 1,22 persen dengan indeks harga konsumen sebesar 127,42. Hal ini juga disebabkan karena penurunan harga kelompok bahan makanan.

Grafik 1. Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Medan Periode Januari – Desember 2016



Laju inflasi kumulatif berdasarkan komponen kelompok penyusunnya dapat dilihat pada grafik 2 dibawah ini. Pada tahun 2016, kelompok yang paling tinggi laju inflasi kumulatifnya adalah kelompok bahan makanan yaitu sebesar 14,85 persen. Sementara kelompok yang laju inflasi kumulatif terendah adalah kelompok Transportasi, Komunikasi, dan jasa keuangan yaitu mengalami deflasi sebesar 1,88 persen.

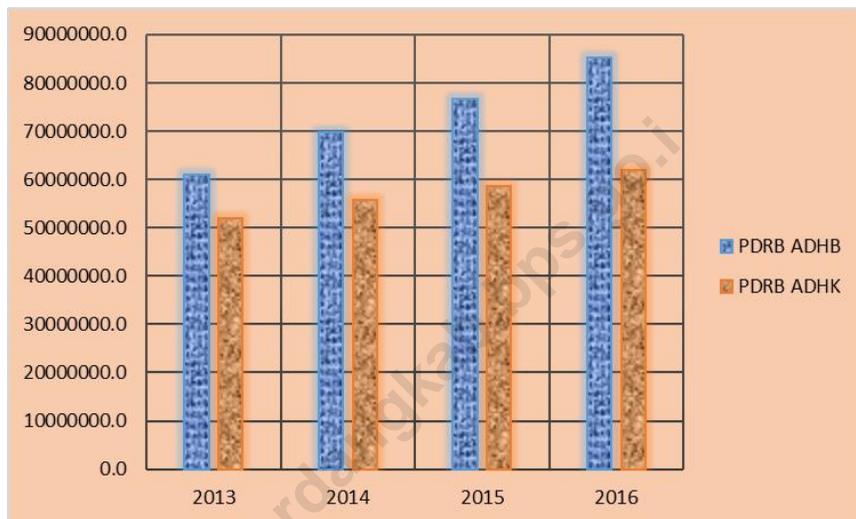
Grafik 2. Laju Inflasi Kumulatif Berdasarkan Komponen Kelompok Penyusun Inflasi



2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. Angka PDRB disajikan dalam dua bentuk yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada grafik 3.

Grifik 3. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016

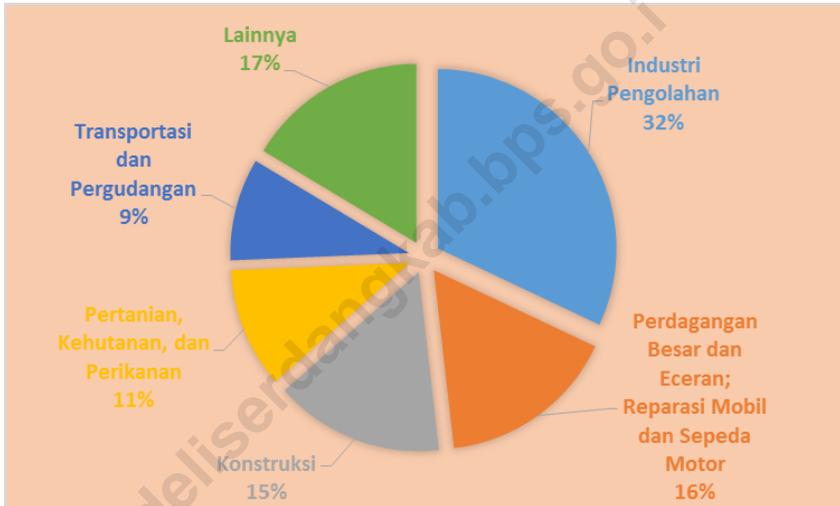


Dari grafik di atas terlihat bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan, pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sebesar 5,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat dibanding tahun sebelumnya, namun besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebenarnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2013 yang masing-masing memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 9,22 dan 7,50 persen.

Distribusi persentase PDRB ADHB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha dapat menjelaskan terkait struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Distribusi persentase PDRB ADHB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4. Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016

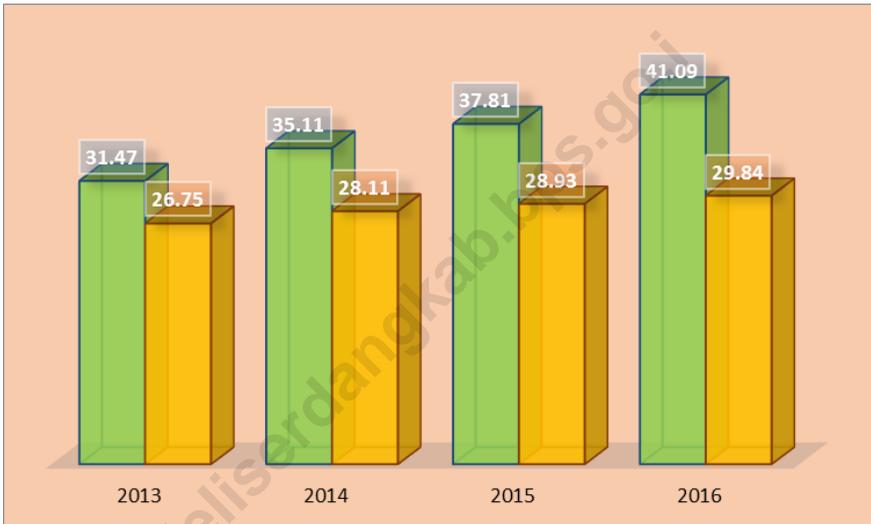


Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa distribusi persentase PDRB tahun 2016 hampir sama dengan tahun sebelumnya dimana lapangan usaha industri pengolahan memberi kontribusi terbesar dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Deli Serdang didominasi oleh industri pengolahan yaitu sebesar 32 persen.

Selain melihat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi suatu wilayah, PDRB juga dapat melihat gambaran pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu wilayah. Pendapatan yang diperoleh penduduk Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dari PDRB perkapita Kabupaten Deli Serdang. Pendapatan perkapita ADHB Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 sebesar Rp. 41,09 juta sedangkan PDRB perkapita ADHB sebesar Rp.

29,84 juta Perkembangan pendapatan penduduk Kabupaten Deli Serdang secara lengkap dapat dilihat pada grafik 5 dibawah ini.

Grafik 5. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016



Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita yang relatif tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena hal ini sangat tergantung pada pertumbuhan penduduk pertengahan tahun. Untuk itu selain meningkatkan pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk juga merupakan satu hal yang penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

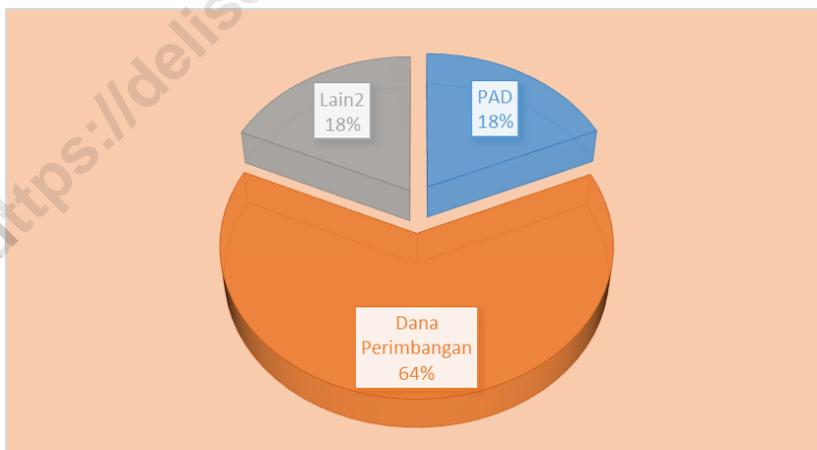
2.3 Keuangan Daerah

Bagian ini menyajikan data yang mencakup pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang. Pada bagian ini dapat dilihat Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 serta rincian pendapatan serta belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016.

Data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 sampai dengan 2016 terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2016, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 573,01 Milyar, pendapatan terbesar berasal dari hasil pajak daerah, yaitu sebesar Rp. 426,48 Milyar atau sekitar 74 persen dari total PAD Kabupaten Deli Serdang (Tabel 10, Lampiran).

Realisasi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 yang terdiri dari Rp 1,83 Triliun belanja tidak langsung atau sekitar 61 persen dari total belanja dan Rp. 1,18 Triliun belanja langsung atau sekitar 39 persen dari total belanja. Dari keseluruhan rincian tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja terbesar adalah belanja pegawai pada bagian belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 1,415 Triliun atau sekitar 47,08 persen dari keseluruhan total realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Tabel 11, Lampiran)

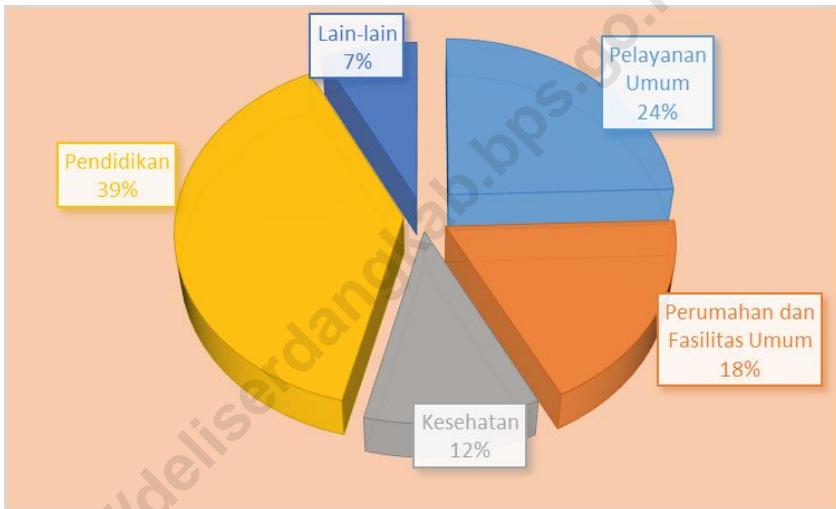
Grafik 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016



Grafik 6 menunjukkan Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 sebesar Rp. 3,11 Triliun, dimana sumber terbesar yaitu dari dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 1,97 Triliun atau sebesar 64 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten

Deli Serdang. Sementara yang bersumber dari PAD sebesar 18 persen dan lain-lain sebesar 18 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Grafik 7. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016



Sementara jika dilihat menurut fungsinya, realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang banyak terkonsentrasi pada fungsi pendidikan yaitu sebesar 39 persen dari total belanja yang ada. Pada fungsi-fungsi lain seperti pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, dan kesehatan masing-masing sebesar 24 persen, 18 persen, dan 12 persen. Sedangkan sisanya sebesar 7 persen terkonsentrasi pada fungsi lainnya.

BAB 3

LAMPIRAN

<https://deliseraidengkab.bps.go.id>

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

Tabel 1. Indeks Harga Konsumen Kota Medan Januari – Desember 2016 (2012=100)

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Jan.	Feb.	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	132,39	133,79	136,47	131,18	132,58	134,48
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	122,63	126,83	128,78	129,2	130,37	131,84
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	122,42	121,6	121,79	121,51	121,61	121,94
Sandang	112,38	113,87	114,9	115,12	115,75	117,33
Kesehatan	114,67	115,08	114,88	114,91	115,46	117,38
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	127,09	127,26	127,13	127,09	127,17	127,92
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	131,18	129,08	129,59	127,79	127,54	127,86
Umum	125,83	126,31	127,42	125,87	126,42	127,45

Tabel 1. Lanjutan

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Juli	Agust,	Sept,	Okt,	Nov,	Des,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	131,78	134,2	140,07	146,37	149,76	149,56
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	132,81	133,49	135,46	135,55	136,37	136,95
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	122,77	123,33	123,34	123,7	124,41	124,75
Sandang	117,89	119,11	118,92	117,71	116,44	115,14
Kesehatan	117,53	118,27	118,68	119,19	119,25	120
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	129,01	132,13	133,02	133	132,94	133
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	129,01	128,62	128,54	128,43	128,36	129,02
Umum	127,54	128,59	130,29	131,74	132,72	132,93

Tabel 2. Persentase Perubahan Indeks Harga Konsumen Kota Medan Terhadap Bulan Sebelumnya Januari – Desember 2016 (2012=100)

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Jan,	Feb,	Maret	April	Mei	Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	2,29	1,06	2,00	-3,88	1,07	1,43
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	1,45	3,42	1,54	0,33	0,91	1,13
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,72	-0,67	0,16	-0,23	0,08	0,27
Sandang	0,20	1,33	0,90	0,19	0,55	1,37
Kesehatan	0,20	0,36	-0,17	0,03	0,48	1,66
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,05	0,13	-0,10	-0,03	0,06	0,59
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	-0,25	-1,60	0,40	-1,39	-0,20	0,25
Umum	0,91	0,38	0,88	-1,22	0,44	0,81

Tabel 2. Lanjutan

Kelompok dan sub kelompok	Bulan					
	Juli	Agust,	Sept,	Okt,	Nov,	Des,
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bahan Makanan	-2,01	1,84	4,37	4,50	2,32	-0,13
Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau	0,74	0,51	1,48	0,07	0,60	0,43
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,68	0,46	0,01	0,29	0,57	0,27
Sandang	0,48	1,03	-0,16	-1,02	-1,08	-1,12
Kesehatan	0,13	0,63	0,35	0,43	0,05	0,63
Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	0,85	2,42	0,67	-0,02	-0,05	0,05
Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	0,90	-0,30	-0,06	-0,09	-0,05	0,51
Umum	0,07	0,82	1,32	1,11	0,74	0,16

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	7 825 188,4	8 163 095,5	8 575 183,9	9 221 090,9
B	Pertambangan dan Penggalian	512 320,0	538 947,1	595 658,6	658 671,9
C	Industri Pengolahan	20 634 450,1	22 765 072,3	24 814 769,0	27 251 492,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	79 588,5	82 483,3	91 159,3	94 375,5
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	27 900,7	31 428,0	34 950,9	39 056,5
F	Konstruksi	9 248 095,5	10 441 300,0	11 629 638,2	13 052 470,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9 757 261,9	10 862 050,4	12 197 294,9	13 783 594,1
H	Transportasi dan Pergudangan	3 565 110,7	6 244 138,5	6 999 308,4	7 868 517,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 552 984,6	1 777 269,3	1 996 591,1	2 227 455,4
J	Informasi dan Komunikasi	778 656,0	813 986,0	873 496,1	941 932,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 845 271,7	1 992 905,9	2 210 618,0	2 472 522,7
L	Real Estate	2 034 469,7	2 337 135,0	2 696 828,9	3 114 391,5
M N	Jasa Perusahaan	258 949,9	292 543,2	333 008,0	374 579,2
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 254 502,1	1 422 457,1	1 574 227,6	1 701 688,6
P	Jasa Pendidikan	995 554,0	1 115 081,2	1 205 679,5	1 318 682,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	524 737,7	603 108,0	692 139,8	791 659,6
R S T U	Jasa lainnya	166 813,1	191 058,6	214 078,0	239 835,7
PDRB		61 061 854,5	69 674 059,4	76 734 630,1	85 152 016,9

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2013-2016 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	6 751 263,3	6 868 878,9	7 152 905,5	7 452 729,6
B	Pertambangan dan Penggalian	444 183,6	460 377,3	476 774,8	501 853,6
C	Industri Pengolahan	17 589 772,8	18 214 337,7	18 920 121,3	19 739 057,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	76 201,2	83 393,4	89 530,6	93 921,9
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	23 875,5	25 030,3	26 440,2	27 908,4
F	Konstruksi	7 696 443,3	8 101 721,1	8 653 726,3	9 191 718,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 564 483,3	9 156 421,5	9 711 703,6	10 304 705,0
H	Transportasi dan Pergudangan	2 795 986,5	4 469 368,9	4 698 336,0	5 016 817,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 320 823,6	1 410 828,1	1 515 318,7	1 621 083,0
J	Informasi dan Komunikasi	788 216,9	832 028,5	885 726,2	932 185,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 503 074,2	1 533 089,2	1 631 650,8	1 712 865,2
L	Real Estate	1 628 535,8	1 757 573,8	1 892 096,5	2 030 872,3
M N	Jasa Perusahaan	221 571,3	237 719,0	254 697,1	272 135,6
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999 010,3	1 047 487,2	1 105 804,7	1 130 292,6
P	Jasa Pendidikan	887 643,5	944 438,9	1 004 273,5	1 068 299,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	465 853,5	500 842,9	538 243,5	577 840,2
R S T U	Jasa lainnya	139 123,4	147 212,6	156 324,4	165 388,8
PDRB		51 896 062,0	55 790 749,1	58 713 673,6	61 839 674,9

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	12,82	11,72	11,18	10,83
B	Pertambangan dan Penggalian	0,84	0,77	0,78	0,77
C	Industri Pengolahan	33,79	32,67	32,34	32,00
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,12	0,12	0,11
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05
F	Konstruksi	15,15	14,99	15,16	15,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,98	15,59	15,90	16,19
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	8,96	9,12	9,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,55	2,60	2,62
J	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,17	1,14	1,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	2,86	2,88	2,90
L	Real Estate	3,33	3,35	3,51	3,66
M N	Jasa Perusahaan	0,42	0,42	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,05	2,04	2,05	2,00
P	Jasa Pendidikan	1,63	1,60	1,57	1,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,86	0,87	0,90	0,93
R S T U	Jasa lainnya	0,27	0,27	0,28	0,28
PDRB		100	100	100	100

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	13,01	12,31	12,18	12,05
B	Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,83	0,81	0,81
C	Industri Pengolahan	33,89	32,65	32,22	31,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,15	0,15
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,04	0,05	0,05
F	Konstruksi	14,83	14,52	14,74	14,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,50	16,41	16,54	16,66
H	Transportasi dan Pergudangan	5,39	8,01	8,00	8,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,55	2,53	2,58	2,62
J	Informasi dan Komunikasi	1,52	1,49	1,51	1,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,90	2,75	2,78	2,77
L	Real Estate	3,14	3,15	3,22	3,28
M N	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,43	0,44
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,93	1,88	1,88	1,83
P	Jasa Pendidikan	1,71	1,69	1,71	1,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,90	0,92	0,93
R S T U	Jasa lainnya	0,27	0,26	0,27	0,27
PDRB		100	100	100	100

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3,23	1,74	4,13	4,19
B	Pertambangan dan Penggalian	4,32	3,65	3,56	5,26
C	Industri Pengolahan	4,27	3,55	3,87	4,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,41	9,44	7,36	4,90
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	4,58	4,84	5,63	5,55
F	Konstruksi	5,47	5,27	6,81	6,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,52	6,91	6,06	6,11
H	Transportasi dan Pergudangan	190,15	59,85	5,12	6,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	6,81	7,41	6,98
J	Informasi dan Komunikasi	5,06	5,56	6,45	5,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,07	2,00	6,43	4,98
L	Real Estate	7,74	7,92	7,65	7,33
M N	Jasa Perusahaan	6,88	7,29	7,14	6,85
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,81	4,85	5,57	2,21
P	Jasa Pendidikan	8,17	6,40	6,34	6,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,39	7,51	7,47	7,36
R S T U	Jasa lainnya	6,01	5,81	6,19	5,80
PDRB		9,22	7,50	5,24	5,32

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Implisit PDRB Kabupaten Deli Serdang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	115,91	118,84	119,88	123,73
B	Pertambangan dan Penggalian	115,34	117,07	124,94	131,25
C	Industri Pengolahan	117,31	124,98	131,16	138,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	104,45	98,91	101,82	100,48
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	116,86	125,56	132,19	139,95
F	Konstruksi	120,16	128,88	134,39	142,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	113,93	118,63	125,59	133,76
H	Transportasi dan Pergudangan	127,51	139,71	148,97	156,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,58	125,97	131,76	137,41
J	Informasi dan Komunikasi	98,79	97,83	98,62	101,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	122,77	129,99	135,48	144,35
L	Real Estate	124,93	132,98	142,53	153,35
M N	Jasa Perusahaan	116,87	123,06	130,75	137,64
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	125,57	135,80	142,36	150,55
P	Jasa Pendidikan	112,16	118,07	120,05	123,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	112,64	120,42	128,59	137,00
R S T U	Jasa lainnya	119,90	129,78	136,94	145,01
PDRB		117,66	124,88	130,69	137,70

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Angka-angka Agregatif PDRB Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013-2016

URAIAN	Tahun			
	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	61 061 854,5	69 674 059,4	76 734 630,1	85 152 016,8
2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	51 896 062,0	55 790 749,1	58 713 673,6	61 839 674,9
3. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	1 940 183	1 984 598	2 029 308	2 072 531
4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	31,47	35,11	37,81	41,09
5. PPDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	26,75	28,11	28,93	29,84

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016

Jenis Pendapatan	Jumlah (Ribu Rupiah)
(1)	(2)
1. Pendapatan Asli Daerah	573 010 351,00
1.1 Hasil Pajak Daerah	426 484 851,70
1. Pajak Hotel	1 955 295,54
2. Pajak Restoran	17 626 828,77
3. Pajak Hiburan	951 263,65
4. Pajak Reklame	5 190 640,81
5. Pajak Penerangan Jalan	108 019 804,69
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	8 854 760,53
7. Pajak Parkir	5 672 677,15
8. Pajak Air Bawah Tanah	9 819 201,75
9. Pajak Sarang Burung Walet	20 500,00
10. Pajak Lingkungan	133 372 917,80
11. Pajak Bumi dan Bangunan	135 000 961,01
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-
1.2 Hasil Restribusi Daerah	64 803 586,98
1.2.1 Restribusi Jasa Umum	29 552 821,25
1. Restribusi Pelayanan Kesehatan	21 975 479,95
2. Restribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1 787 482,00
3. Restribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-
4. Restribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-
5. Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	556 545,40
6. Restribusi Pelayanan Pasar	2 000 008,00
7. Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 597 167,00
8. Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	74 675,00
9. Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-
10. Restribusi Pelayanan Pendidikan	-
11. Restribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	18 800,00
12. Restribusi Pengelolaan Limbah Cair	-
13. Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1 506 511,90
14. Restribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	14 295,00
15. Restribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	21 857,00

Tabel 10. Lanjutan

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.2.2	Restribusi Jasa Usaha	1 013 788,20
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	333 473,20
2.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	-
3.	Retribusi Tempat Pelelangan	-
4.	Retribusi Terminal	567 970,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	112 345,00
6.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa	-
7.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-
8.	Retribusi Rumah Potong Hewan	-
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	-
10.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-
11.	Retribusi Penyeberangan di Air	-
12.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	-
13.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-
1.2.3	Restribusi Perizinan Tertentu	34 236 977,53
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	28 430 930,41
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	-
3.	Retribusi Izin Gangguan/Keamanan	5 767 119,98
4.	Retribusi Izin Trayek	12 660,00
5.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	26 267,15
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 259 675,20
1.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	17 259 675,20
2.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	-
3.	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	-

Tabel 10. Lanjutan

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64 462 237,13
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-
2.	Penerimaan Jasa Giro	13 412 503,94
3.	Pendapatan Bunga Deposito	-
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-
5.	Komisi Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	961 477,40
7.	Pendapatan Denda Pajak	5 504 435,30
8.	Pendapatan Denda Retribusi	-
9.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-
10.	Pendapatan dari Pengembalian	6 225 063,10
11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-
12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-
13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	-
14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-
15.	Pendapatan BLUD dan JKN	38 182 846,50
16.	Lainnya (Pendapatan dari kelebihan bayar pajak & retribusi piutang pajak ABT yang bernilai negatif)	146 559,88
2.	Dana Perimbangan	1 974 004 465,46
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70 843 987,81
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	68 499 789,99
1.	Pajak Bumi dan Bangunan	32 708 119,20
2.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Neqeri dan PPh Pasal 21	34 607 344,05
3.	Pajak Hasil Cukai Tembakau	1 184 326,74
4.	Lainnya	-
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2 344 197,83
1.	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	-
2.	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	46 511,40
3.	Dana Reboisasi	-
4.	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	-
5.	Pungutan Hasil Perikanan	703 264 033,00
6.	Pertambangan Minyak Bumi	31 580,05
7.	Pertambangan Gas Bumi	777 820,58
8.	Pertambangan Panas Bumi	15 299,12
9.	Lainnya (Mineral dan Batubara Royalty)	1 020 961,13

Tabel 10. Lanjutan

Jenis Pendapatan		Jumlah (Rupiah)
(1)		(2)
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1 494 821 153,00
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	408 339 324,65
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	139 041 344,77
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	269 297 979,88
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	565 328 563,90
3.1	Pendapatan Hibah	14 985 407 620,00
3.2.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	287 330 655,90
3.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	287 330 655,90
1.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	40 919 303,46
2.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49 170 493,75
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79 861 630,02
4.	Bagi Hasil dari Pajak Penqambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2 701 582,87
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	114 677 645,81
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35 011 114,00
3.3.1	Dana Penyesuaian	35 011 114,00
3.3.2	Dana Otonomi Khusus	-
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5 223 150,00
3.4.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5 223 150,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang

Tabel 11. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016

Jenis Belanja	Jumlah (Ribu Rupiah)
(1)	(2)
1. Belanja Tidak Langsung	1 829 080 248,60
1.1. Belanja Pegawai	1 415 108 041,88
1.2. Belanja Bunga	-
1.3. Belanja Subsidi	-
1.4. Belanja Hibah	10 420 800,00
1.5. Belanja Bantuan Sosial	-
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	162 324 285,96
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	240 228 263,26
1.8. Belanja Tidak Terduga	998 857,49
2. Belanja Langsung	1 176 355 138,25
2.1. Belanja Pegawai	38 640 075,20
2.2. Belanja Barang dan Jasa	576 429 462,72
2.3. Belanja Modal	561 285 600,33

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang

Tabel 12. Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016

Jenis Belanja	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
Belanja Menurut Fungsi	3 005 435 386,84
1. Pelayanan Umum	734 412 125,10
2. Ketertiban dan Keamanan	34 698 460,87
3. Ekonomi	127 406 332,66
4. Lingkungan Hidup	38 843 883,90
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	541 076 165,66
6. Kesehatan	344 052 897,09
7. Pariwisata dan Budaya	7 441 435,18
8. Pendidikan	1 163 349 961,80
9. Perlindungan Sosial	14 154 124,58

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang

Tabel 13. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016

Jenis Pembiayaan	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)
Pembiayaan	151 705 979,05
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	156 705 979,05
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	156 663 304,05
1.2 Pencairan Dana Cadangan	-
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	42 675,00
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	-
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-
1.8 Penerimaan Kembali Investasi Permanen Lainnya	-
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5 000 000,00
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5 000 000,00
2.3 Pembayaran Pokok Utang	-
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	-
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	258 613 972,57

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang

Tabel 14. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012-2016

Tahun anggaran	Pendapatan (Ribu Rupiah)	Belanja (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)
2013	2 096 336 073,55	2 034 622 488,87
2014	2 450 204 561,76	2 392 252 735,84
2015	2 782 141 454,68	2 735 624 354,97
2016	3 112 343 380,37	3 005 435 386,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

BPS-Statistics of Deli Serdang Regency
Jl. Karya Utama Komplek Pemkab Deli Serdang
Lubuk Pakam 20514 | Telp./Fax 061-7951326
Email: bps1212@bps.go.id
Website: <https://deliserdangkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6374-72-3

